

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2021



PT. BPR DANA KARYA NUSA

**Jl. By Pas Ir. Soekarno, Br. Dinas Sanggulan, Ds. Banjar Anyar, Kediri,
Tabanan, Bali Telp. 0361.7993334, HP: 085333866326**

email : bpr.danakaryanusa@gmail.com

**email Whistleblowing System :
wbs.danakaryanusa@gmail.com**

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA



**PT. BPR DANA KARYA NUSA
TAHUN 2021**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Jalan By Pass Ir Soekarno Sanggulan Banjar Anyar Kediri Tabanan

Nomor Telepon : 03617993334

Penjelasan Umum : Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggung jawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan Kewajaran (Fairness). Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelola usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) di dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah-langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi. Dan dimana tujuan penerapan tata kelola bank yaitu meningkatkan Kinerja PT BPR Dana Karya Nusa, Melindungi kepentingan stakeholders PT BPR Dana Karya Nusa dan Meningkatkan kepatuhan manajemen dan karyawan PT BPR Dana Karya Nusa terhadap peraturan perundang-undangan

Form A.01.10

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Eko Budi Handoyo	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Jabatan direktur utama ymf kepatuhan, bertanggung jawab atas kepemimpinan BPR, mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab, wajib menerapkan tata kelola, menindaklanjuti temuan audit, memastikan terpenuhinya sdm yang memadai, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam rups, mengungkapkan kebijakan bpr yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada rups dan pemegang saham dalam hal mencapai tujuan dan tindakan yang dijalankan pada bank, mewakili perusahaan didalam dan diluar pengadilan dalam segala kejadian, bertanggungjawab dalam kegiatan operasional dan pemasaran, mengambil keputusan, merencanakan dan menetapkan program kerja, mewakili perusahaan dalam hubungan dengan instansi lain, secara periodik memimpin rapat, Tugas dan tanggung jawab direksi ymf kepatuhan, menetapkan langkah untuk memastikan bpr telah memenuhi seluruh peraturan ojk dan perundang undangan, memantau dan menjaga agar tidak menyimpang dari peraturan, memantau dan menjaga kepatuhan bpr, melaporkan tugas dan tanggung secara berkala kepada komisaris
2	I Nengah Suarta SS	Direktur	Jabatan direktur, bertanggungjawab atas kepemimpinan bpr, mengelola bpr sesuai kewenangan dan tanggung jawab, menerapkan tata kelola, menindaklanjuti temuan audit, memastikan terpenuhi sdm, mempertanggungjawabkan tugasnya kepada pemegang saham dalam rups, mengungkapkan kebijakan bpr yang bersifat strategis dibidang kepegawaian, bertanggungjawab kepada rups dan pemegang saham dalam hal mencapai tujuan perusahaan dan tindakan yang dijalankan, membantu tugas direktur utama, mengadakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua unit kerja, mengambil alih tugas direktur utama apabila berhalangan hadir, memberi masukan dan jalan keluar atas kecenderungan angka kepada direktur utama dan mengemban bersama-sama untuk pemecahannya, bersama direktur utama merencanakan dan menetapkan program kerja perusahaan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2021 penerapan tata kelola di BPR Dana Karya Nusa telah berjalan dengan baik, namun masih ada hal yang masih perlu mendapatkan perhatian terutama untuk pemenuhan anggota dewan komisaris yang belum lengkap, Direksi dalam operasionalnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola di setiap kegiatan disetiap jenjang organisasi, Direksi telah menindak lanjut setiap temuan dari ojk, temuan dari kantor akuntan publik, temuan dari intern audit serta temuan dari hasil pengawasan komisaris

Penjelasan Lebih Lanjut (jika ada)

Form A.01.10
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Footer 2

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	I Ketut Sudarsa	Komisaris Utama	Jabatan sebagai Komisaris Utama, melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, memastikan tereleenggaranya tata kelola, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, mengarahkan pelaksanaan kebijakan strategis bpr, dalam pelaksanaan pengawasan dileraing ikut serta dalam pengambilan keputusan, memastikan dirakal menindaklanjuti temuan audit, memberitahukan pelanggaran peraturan perundang undangan, menanggapi dan menyetujui rencana kerja pendek dan jangka panjang direksi, melakukan pengawasan laporan, melakukan rapat satu kali dalam 3 bulan, menyampaikan hasil rapat kepada direksi, memimpin rups, mengawasi pelaksanaan tanggung jawab direksi terhadap prinsip apu ppt, menyetujui kebijakan perkreditan bpr, menyetujui rencana kredit tahunan, melaporkan hasil pengawasan terhadap penerapan pedoman kebijakan perkreditan bpr kepada ojk, menyusun laporan pelaksanaan rencana kerja setiap akhir semester yang dilaporkan kepada ojk, membuat pedoman tata tertib kerja serta tata tertib rapat, menyediakan waktu yang cukup kepada bank, melaksanakan tugas lain sepanjang masih berada dalam ruang lingkup fungsi dewan komisaris
Rekomendasi Kepada Direksi			
Dewan komisaris sudah memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola di BPR Dana Karya Nusa dengan baik			
Penjelasan Lebih Lanjut (Aneka dipisahkan)			
Footer 2			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Tugas dan tanggung jawab komite nihil karena BPR Dana Karya Nusa belum memiliki komite.

Form A.01.32

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Rengsekan Lebih Lanjut (Jika ada diperlukan)

Footer 1

Form A.01.33

Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Putri

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Pengisian Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Program kerja dan realisasi program kerja komite Nihil karena belum memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budi Handoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Nengah Suarta SS	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan pemegang saham

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Eko Budi Handoyo	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	I Nengah Suarta SS	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota direksi PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota direksi lain, anggota dewan komisaris dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	I Ketut Sudarsa	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (jika diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan pemegang saham

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Ketut Sudarso	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (jika diperlukan)

Dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lain, anggota direksi dan pemegang saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	276000000	1	84000000
2	Tunjangan	2	22000000	1	12000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		298000000		96000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Paket/kebijakan remunerasi bagi direksi dan dewan komisaris PT BPR Dana Karya Nusa ditetapkan berdasarkan RUPS

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Ditetta dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	0	0
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi, BBM, Service, Asuransi TLO per 1 unit (untuk direktur utama), Mobil (sewa untuk direktur), BBM	0
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan per 2 unit, BPJS Ketenagakerjaan per 2 unit	BPJS Kesehatan per 1 unit, BPJS Ketenagakerjaan per 1 unit
4	Fasilitas lainnya	Asuransi pensiun (DPLK) per 2 unit, Tunjangan pajak PPH21 per 2 unit, Biaya perjalanan dinas/perdiem (BPD) per 2 unit, cuti tahunan per 2 unit	Asuransi pensiun (DPLK) per 1 unit, Tunjangan pajak PPH21 per 1 unit, Biaya perjalanan dinas atau perdiem (BPD) per 1 unit, cuti tahunan per 1 unit
Bersifat Lebih Lemut (Apabila diperlukan)			
Sudah berdasarkan RUPS			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,99	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,30	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,86	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,46	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau ketentuan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan selama 1 tahun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	25-01-2021	4	1. Rencana bisnis BPR, 2. Isu-Isu strategis BPR, 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, 4. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
2	02-03-2021	4	1. Rencana bisnis BPR, 2. Isu-Isu strategis BPR, 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, 4. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
3	22-04-2021	3	1. Rencana bisnis BPR, 2. Isu-Isu strategis BPR, 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, 4. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR
4	03-06-2021	3	1. Rencana bisnis BPR, 2. Isu-Isu strategis BPR, 3. Evaluasi/penetapan kebijakan strategis, 4. Evaluasi realisasi rencana bisnis BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran anggota dewan komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib peraturan rapat anggota dewan komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	I Ketut Sudarsa	199	0	0,49

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran dewan anggota komisaris sesuai dengan pedoman dan tata tertib waktu kerja anggota dewan komisaris

Form A.09.00

Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rubin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (setahun) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1
Telah Diselesaikan		0		0		0		1
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jumlah penyimpangan internal fraud pegawai tidak tetap sebanyak satu orang dan sudah terselesaikan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Permasalah hukum yang dihadapi PT BPR Dana Karya Nusa Nihil (tidak ada permasalahan hukum baik perdata atau pidana)

Form A.11.00

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	I Nengah Suarta SS	Direktur	Eko Budi Handoyo	Direktur Utama	Sewa Mobil	35	untuk penggunaan mobil operasional direktur
Penjabaran Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)							

Sudah sesuai dengan ketentuan

Form A.12.00

Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik belum ada (nihil) pada tahun 2021

Nama BPR	: PT. BPR DANA KARYA NUSA
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: Jl by pass ir soekarno banjar dinas sanggulan banjar Anyar kediri tabanan
Nomor Telepon	: (0361)7993334
Modal Inti BPR	: 8.609.965.023,00
Total Aset BPR	: 18.655.656.921,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 2,0
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Berdasarkan kertas kerja self assessment tata kelola bagi bpr pada posisi akhir desember 2021 dapat disampaikan kesimpulan umum hasil self assessment good corporate governance sebagai berikut nilai komposit sebesar 2.0 dan peringkat kompositnya ada di posisi 2 dimana mencerminkan kondisi bpr yang secara umum baik dan sehat,kelemahan dan penyebab anggota dewan komisaris hanya ada 1 orang, karena salah satu anggota komisaris mengundurkan diri sehingga penerapan tata kelola di tahun 2021 belum sesuai karena modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah harusnya ada dua anggota dewan komisaris,rencana tindak lanjut melengkapi dewan komisaris agar penerapan tata kelola PT Bpr dana karya nusa optimal ditahun 2022, dan PT BPR dana karya nusa berkomitmen senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan dengan baik yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan 8 x P x H	Total Penilaian Faktor	Kegimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,82	0,80	0,20	1,92	0,384	Jumlah anggota direksi sudah sesuai ketentuan BPR dengan modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah, Salah satu direksi adalah direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Seluruh anggota direksi telah lulus uji kemampuan, tugas dan tanggung jawab dilakukan dengan baik
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	1,06	0,80	0,20	2,06	0,309	Belum sesuai ketentuan dengan jumlah anggota dewan komisaris 1 orang Anggota komisaris PT BPR Dana Karya Nusa sudah lulus uji kemampuan dan melakukan tugas tanggung jawab sesuai ketentuan
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	Modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah belum memiliki komite
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	BPR sudah memiliki SOP benturan kepentingan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	Salah satu direksi adalah direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan sudah ada Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,00	0,90	0,20	2,10	0,210	Penerapan fungsi audit intern sudah dilakukan oleh pejabat eksekutif yang menangani fungsi audit
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	1,00	0,80	0,20	2,00	0,050	Sudah dilaksanakan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0,200	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Tidak terdapat pelanggaran BMPK pada tahun 2021
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Rencana bisnis bank di tahun 2021 sudah disetujui oleh dewan komisaris dan disupport oleh pemegang saham

Form B.00.01

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Masing-Masing Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Kumulatif S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0,150	Bank menyampaikan informasi secara transparan dan saat ini corebanking system BPR sudah berbentuk IBS sehingga laporan bersifat tepat dan realtime
Nilai Komposit						2,0	
Peringkat Komposit						Baik	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Sudah sesuai ketentuan PT BPR Dana Karya Nusa dengan modal inti kurang dari lima puluh milyar rupiah jumlah anggota direksi 2 orang dan salah satu direksi bertindak sebagai direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota direksi berada di satu provinsi yang sama
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	2	sudah sesuai ketentuan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	2	tidak memiliki hubungan keluarga
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kasual memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	sudah sesuai ketentuan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	2	Seluruh anggota direksi telah lulus
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rate-rata	1,83	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,92	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penetapan	Keterangan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
7	Direksi melaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	sudah sesuai ketentuan
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	sudah sesuai ketentuan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	sudah sesuai ketentuan
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	sudah sesuai ketentuan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi dan tidak menerima keuntungan pribadi dari BPR
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	sudah sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	sudah sesuai ketentuan
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	18	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nb	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	2	sudah sesuai ketentuan
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	sudah sesuai ketentuan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	sudah sesuai ketentuan
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	sudah sesuai ketentuan
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	2	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

no	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (8)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	3	Belum sesuai ketentuan,dengan jumlah anggota dewan komisaris 1 orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	2	Jumlah anggota komisaris 1 orang
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepetutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	2	sudah sesuai ketentuan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	2	Anggota komisaris bertempat tinggal di provisi yang sama dengan BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	sudah sesuai ketentuan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	2	Dewan komisaris tidak merangkap jabatan dewan komisaris tidak lebih dari 2 BPR
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	2	Anggota dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Fitur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Punkte / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	19	
	Rata-rata	2,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,06	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	sudah sesuai ketentuan
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	sudah sesuai ketentuan
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	sudah sesuai ketentuan
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	sudah sesuai ketentuan
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	sudah sesuai ketentuan

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (AFOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Kelembagaan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	sudah sesuai ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	sudah sesuai ketentuan
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Keterangan
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Keterangan
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Indikator / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Revisi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kategori / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Name Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Retri

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (\$)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	2	Sudah sesuai ketentuan, anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Sudah sesuai ketentuan, anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	2	Sudah sesuai ketentuan,
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Sudah sesuai ketentuan
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Sudah sesuai ketentuan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
9	Setuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
10	Setuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penetapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	2	Sudah sesuai ketentuan, memiliki pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	2	Sudah sesuai ketentuan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rubrik

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rubin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menugaskan pihak eksternal untuk melakukan uji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Sudah sesuai ketentuan
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Sudah sesuai ketentuan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan hasil uji ulang oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai ekele penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Milliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Kepatuhan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	2	Sudah menunjuk pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Kelengkapan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Sudah sesuai ketentuan
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	Sudah sesuai ketentuan
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	Sudah sesuai ketentuan
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah sesuai ketentuan
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penetapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kategori Indikator	Skala Penerapan	Peterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penetapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Sudah sesuai ketentuan, Rencana bisnis BPR telah disusun oleh direksi dan disetujui oleh dewan komisaris sesuai visi dan misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Putra

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penilaian	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00
Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Batas Penerimaan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Sudah sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rate-rate	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR DANA KARYA NUSA

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR DANA KARYA NUSA**

Demikian laporan tata kelola tahun 2021 yang dapat kami sampaikan, harapannya PT BPR Dana Karya Nusa ditahun berikutnya dapat menerapkan tata kelola lebih optimal.

Tabanan, 28 Maret 2022

PT BPR DANA KARYA NUSA



I Ketut Sudarsa
Komisaris Utama



BANK DANA KARYA NUSA
PT. BPR DANA KARYA NUSA
Jl. ...



Eko Budi Handoyo
Direktur Utama Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR DANA KARYA NUSA
Posisi Laporan : 31 Desember 2021
Alamat : Jl By Pass Ir Soekarno, Br Dinas Sanggulan, Ds Banjar Anyar,
Kediri, Tabanan
No Telepon : 0361-7993334

Modal Inti BPR : Rp. 8.609.965.022,50
Total Aset BPR : Rp. 18.655.656.921,48
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : 1
Nilai Komposit : 2.0
Peringkat Komposit : 2

Berdasarkan kertas kerja self assessment tata kelola bagi BPR (Good Corporate Governance) pada posisi akhir Desember 2021 dapat disampaikan kesimpulan umum hasil self assessment good corporate governance sebagai berikut :

1. Nilai komposit dan Peringkat komposit dan Predikatnya :

Hasil perhitungan Nilai Komposit sebesar 2.0 dan predikat kompositnya ada di posisi 2 dimana mencerminkan kondisi BPR yang secara umum baik dan sehat.

2. Peringkat masing – masing faktor

No	Faktor	Peringkat
1.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,384
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,309
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	0,200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	0,200
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	0,210
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	0,050
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	0,200
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	0,150
10	Rencana Bisnis BPR	0,150
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaporan internal	0,150
	Nilai Komposit	2.0
	Peringkat Komposit	2

3. Kelemahan dan penyebabnya :

Kelemahan : Anggota dewan komisaris hanya ada 1 orang

Penyebab : Salah satu anggota komisaris ditahun 2021 mengundurkan diri

Sehingga penerapan tata kelola ditahun 2021 belum sesuai karena BPR dengan modal inti kurang dari 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) harusnya ada dua anggota dewan komisaris.

4. Rencana Tindak Lanjut (Action Plan)

- Rencana tindak lanjut BPR melengkapi dewan komisaris agar penerapan tata kelola PT BPR Dana Karya Nusa optimal di tahun 2022
- Dengan ini PT BPR Dana Karya Nusa berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang menjunjung tinggi etika dan standar profesionalisme pada seluruh jenjang organisasi

Tabanan, 28 Maret 2022

PT BPR DANA KARYA NUSA



Ketut Sudarsa
Komisaris Utama



BANK DANA KARYA

PT BPR Dana Karya Nusa

Memberikan Jasa Keuangan yang Berkualitas



Eko Budi Handoyo

Direktur Utama Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan

